



Dana Pengamanan Pilkada Cair

DENPASAR, NusaBali

Pemkot Denpasar telah mencairkan dana sebesar Rp 2,6 miliar untuk pengamanan pilkada, 9 Desember 2015. Lambatnya pencairan dana pengamanan pilkada itu karena masuk dalam APBD perubahan, serta banyaknya syarat administrasi yang mesti dipenuhi.

"Dana pengamanan Pilkada Denpasar sudah cair. Pencairan dana itu telah dilakukan bagian keuangan. Dana pengamanan sudah ditransfer kepada instansi terkait, per 19 Oktober 2015," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Denpasar IB Rahoela sembari memperlihatkan bukti transfer, Selasa (20/10).

Lambatnya pencairan dana ini, kata dia, karena dana itu dianggarkan dalam APBD perubahan. Sehingga Oktober baru bisa ditin-

dakanjuti. Selain itu, alotnya pencairan dana ini tidak terlepas dari banyaknya syarat administrasi yang harus dilengkapi. "Sepanjang syaratnya belum lengkap, bagaimana kami bisa mencairkan dana itu," kata Rahoela.

Pihaknya berharap dengan cairnya dana ini, dapat bermanfaat bagi pengamanan pemilihan kepala daerah mendatang.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra dan Ketua Fraksi Hanura DPRD Denpasar IB Ketut Kiana, berharap agar dana tersebut segera dicairkan. "Proses pilwali sudah berjalan. Karena itu, anggaran dana pengamanan harus segera dicairkan," kata keduanya.

Susruta menyebutkan, dukungan pengamannya pada saat pilwali

sangat strategis. Karena itu, pihaknya mendesak agar pencairan dana-dana pendukung itu harus segera direalisasikan. Terlebih, saat ini telah memasuki masa kampanye yang rentan terhadap gangguan kamtibmas. "Kami berharap proses pilwali ini tidak sampai mengganggu keamanan, namun antisipasinya harus tetap menjadi perhatian," ujar Kiana.

Disebutkan, dalam APBD induk dan perubahan yang telah ditetapkan, jumlah dana yang dialokasikan untuk kelancaran pilwali, cukup besar. Dana yang dialokasikan ke KPU mencapai Rp 16,6 miliar, Panwas dialokasikan sebesar Rp 4,2 miliar, polisi mendapat alokasi anggaran Rp 2,6 miliar, dan TNI sebesar Rp 548 juta. "Ini yang sudah ketok palu, kalau ada perubahan saya tidak tahu," jelas Susruta. **in**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 3



Dewan Siap Ambil Risiko Demi Cairnya Dana Bansos-Hibah

★ Panggil Gubernur untuk Kesepakatan
Pencairan Lewat Acuan Perda APBD-P

DENPASAR, NusaBali

DPRD Bali habis kesabaran atas macetnya pencairan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah, menyusul adanya Surat Edaran (SE) Mendagri yang mengharuskan penerima bansos berbadan hukum. Dewan pun akan panggil Gubernur Bali, guna bikin kesepakatan untuk mencairkan bansos dengan acuan hukum Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan.

Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menegaskan Dewan bisa mencairkan bansos dan hibah dengan acuan hukum Perda APBD Perubahan yang sudah diverifikasi Mendagri. Ini jauh lebih memungkinkan,

ketimbang menunggu payung hukum pencairan bansos melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang masih diajukan ke Mendagri.

Menurut Adi Wiryatama, mengajukan Pergub ke Mendagri untuk mencairkan bansos dan hibah justru tidak masuk logika dan bisa tanpa legalitas. Soalnya, Mendagri belum pasti akan meloloskan verifikasi Pergub yang diajukan dari Bali. Nah, supaya rakyat yang sudah menunggu bansos tidak menjadi korban, kata dia, DPRD Bali akan berinisiatif mencairkan bansos yang sudah masuk di Perda

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Dewan Siap Ambil Risiko Demi Cairnya Dana... ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

APBD Perubahan 2015.

"Nanti kita panggil Gubernur, kita kumpulkan seluruh 55 anggota DPRD Bali. Kita bikin saja kesepakatan demi rakyat Bali. Bansos kan harus dicairkan. Ini jalan terakhir yang kami rancang," ujar Adi Wiryatama di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (20/10).

Adi Wiryatama menegaskan, demi bisa cairnya bansos dan hibah ini, 55 anggota DPRD Bali nanti harus juga siap tanggung risikonya. "Bagi saya, kalau tidak berani bela rakyat dengan segala risikonya, lebih baik mundur saja. Hari ini (kemarin) saya telepon Mendagri Pak Tjahjo Kumolo, tapi katanya belum ada keputusan. Padahal, waktu sudah sangat mepet," ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan 2000-2005 dan 2005-2010 ini.

Menurut Adi Wiryatama, paung hukum untuk pencairan bansos bagi rakyat Bali sebenarnya sudah jelas, yani Perda APBD Perubahan 2015. Perda ini adalah lanjutan dari Perda APBD Induk 2015. "Induk bisa cair, ini di tahun yang sama kok tidak bisa cair? Sangat aneh. Nanti kami rancang, Dewan membuat statemen bersama. Kasihan masyarakat menunggu terlalu lama cairnya bansos tersebut," tegas Adi Wiryatama.

Saat ini, ada Rp 46 miliar dana bansos yang difasilitasi DPRD Bali dalam APBD Perubahan 2015, yang bisa menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). "Dana ini sudah ditunggu rakyat. Makanya, kita akan panggil Gubernur, anggota Dewan juga dirapatkan," tegas poliisi asal Banjar Tegoh, Desa Angseri,

Kecamatan Baturiti, Tabanan yang peraih suara terbanyak sed-Bali untuk kursi DPRD Provinsi dalam Pileg 2014 ini.

Sedangkan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung, Ida Bagus Padakusuma, menyatakan sepakat dengan pemikian Adi Wiryatama. Menurut IB Padakusuma, bansos sudah ditanya-tanya masyarakat Bali. Kalau sampai tidak cair, anggota Dewan selaku yang memfasilitasi bansos akan malu.

"Kalau bansos tidak cair akhir tahun 2015 ini, *bocok tiang* (malu saya). Kasus ini mengulangi peristiwa tahun 2013 di mana bansos gagal cair. Anggota Dewan kala itu tidak berani menemui rakyat, karena dianggap telah berbohong," kenang politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.

Beda lagi statemen anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, Ketut Kariyasa Adnyana. Menurut Kariyasa, dana bansos di APBD Perubahan 2015 yang tidak cair ini merupakan bagian tak terpisahkan dari APBD Induk 2015. Jadi, kata dia, tidak ada alasan untuk tak mencairkan bansos.

"Soal penerima bansos harus berbadan hukum, ketentuan itu kan baru berlaku tahun 2016 mendatang. Hasil konsultasi Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Bali juga sama: bansos sebenarnya bisa dicairkan. Cuma, karena penafsiran SE Mendagri ini direspons ekskeutif (Pemprov Bali) dengan mengirinkan Pergub lagi, harus ditunggu," tegas poliisi PDIP asal Busungbiu, Buleleng ini.

Sebaliknya, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar, I Kadek Diana, mengatakan yang terpenting dibutuhkan sekarang adalah

ketegasan sikap Gubernur Made Mangku Pastika. "Mau disesuaikan dengan ketentuan peraturan, silakan dan memang begitu. Tapi, ada persoalan waktu di sini. Ini kan tidak bisa dibiarkan mengambang. Ada masa berlakunya anggaran itu," tandas Kadek Diana.

"Yang terpenting, ada sikap dulu-lah. Jangan hanya istilah 'misalkan' dan 'kalau'. Kita ya sangat berharap bisa segera diambil sikap tegas dan pasti terkait pencairan bansos ini," lanjut politisi asal Sukawati yang juga mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar ini.

Menurut Kadek Diana, sebetulnya ada solusi kalau bansos dan hibah tidak bisa cair. Yakni, anggaran yang diposting dihibahkann atau dialihkan ke belanja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lewat program kegiatan. "Hanya saja, harus dilakukan perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Perencanaan Anggaran Sementara)," papar Kadek Diana.

Sementara itu, Plt Karo Humas Setda Provinsi Bali, Ketut Teneng, mengatakan proses pencairan dana bansos masih diverifikasi di pusat. "Ya, sebaiknya tunggu dulu itu. Pak Gubernur sendiri sudah memproses seluruh anggaran yang diajukan oleh masyarakat," ujar Ketut Teneng saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Selasa kemarin.

"Soal nanti ada undangan dari Dewan, tentu melihat agenda pimpinan kami (Gubernur). Kalau demi rakyat, kenapa tidak? Tapi, sekarang bolanya ada di pusat," lanjut birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Kepala Inspektorat Provinsi Bali. nat

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015
Hal : 15



Dugaan Korupsi Jembatan Lemukih

Saksi Ngaku Tidak Pernah Lihat Proyek



TERDAKWA kasus dugaan korupsi jembatan Lemukih, Hj Arisyah Agustina berjalan meninggalkan ruang sidang usai jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (20/10).

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Buleleng dengan dua terdakwa, yaitu Wayan Wenten yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Hj Arisyah Agustina yang merupakan rekanan proyek dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (20/10).

Dalam sidang, saksi Banuwati yang merupakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengaku

tidak pernah turun ke lapangan mengecek proyek. Parahnya lagi, Banuwati juga mengaku tidak pernah melihat kontrak kerja. Hal ini sempat memancing emosi majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha.

Ia mengatakan seharusnya sebagai PPHP, Banuwati harus turun ke lokasi untuk mengecek proyek tersebut. "Bukan hanya menerima hasil pekerjaan saja tanpa mengecek ke lokasi," jelas Suarditha. Banuwati

beralasan dirinya tidak pernah mengecek proyek karena tidak ada permintaan dari rekanan proyek.

Namun Banuwati mengaku sempat tandatangan hasil laporan pengerjaan yang menyebutkan sudah terealisasi 45 persen. Padahal, wanita berambut pendek ini mengaku tidak pernah turun ke lokasi. "Lalu dari mana anda bisa tanda tangan laporan hasil pengerjaan 45 persen ini?," tanya majelis hakim.

Banuwati yang sudah terpojok tetap mengatakan tidak tahu terkait laporan tersebut dan hanya tanda tangan mengikuti tanda tangan pejabat lainnya. "Saya hanya tanda tangan saja karena waktu itu sudah sore dan laporan harus selesai," ujarnya.

Keterangan Banuwati ini juga sempat membuat kuasa hukum kedua terdakwa emosi. Kuasa hukum Wenten, Made Adnyana sempat menanyakan honor yang diterima Banuwati sebagai PPHP. Meskipun ia tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut. "Saya dapat honor Rp 150 ribu tiap bulan selama 12 bulan," terangnya. **rez**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 5



Eksekutif Buka-bukaan Soal Anggaran yang Diduga 'Siluman'

★ Pemkab Badung Berencana Naikkan Kesejahteraan PNS

MANGUPURA, NusaBali

Eksekutif akhirnya buka suara soal temuan selisih anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 37 miliar. Anggaran sebesar itu tiba-tiba muncul pada RAPBD 2016, padahal tidak pernah dibahas di dewan. Versi eksekutif, anggaran itu didapat dari sisa Silpa tahun anggaran sebelumnya.

Penjelasan eksekutif dilakukan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kompyang R Swandika, saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) di kantor DPRD Badung, Selasa (20/10), yang dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka.

Pada rapat yang dimulai sekitar pukul 09.00 Wita tersebut, Koordinator Banggar I Made Sunarta yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung langsung buka-bukaan soal anggaran yang diduga 'siluman' itu. Pasalnya anggaran tidak sepengetahuan dewan. Karenanya, pada kesempatan tersebut eksekutif perlu memberikan penjelasan agar semuanya jelas.

"Mohon dijelaskan angka Rp 37 miliar itu dari mana dan untuk apa saja?" kata Sunarta yang juga Bendesa Adat Abianbase, Kelurahan Kapal, Mengwi.

Mendapat pertanyaan demikian, Kompyang R Swandika langsung membeber dari mana anggaran itu berasal. Menurut dia angka Rp 37 miliar didapat dari sisa Silpa tahun anggaran sebelumnya. Soal untuk apa dana itu, Sekkab Badung itu mengatakan, penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk belanja yang dinilai penting. "Jadi anggaran itu untuk hal-hal yang sifatnya penting," jelasnya. Misal, untuk pembelian mobil pemadam kebakaran (damkar) senilai Rp 14 miliar dan lain-lain.

Terkait dengan kebutuhan armada damkar di Badung, diperjelas lagi semata-mata untuk kebutuhan. Ia mengaku walaupun kendaraan damkar sudah banyak, tapi tidak ada yang bertangga. "Jadi, kalau ada kebakaran gedung bertingkat, kami tak berdaya," ujar pejabat asal Kerobokan, itu.

Selain damkar, dana Rp 37 miliar juga digunakan untuk membuat kelas baru di beberapa sekolah. Sayangnya, tak dijelaskan dengan rinci di mana saja

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 2



Sambutan ~ ~

alokasi anggaran akan dikurikan.

Kompyang R Swandika juga menyatakan walau KUA-PPAS sudah diteken, bukan berarti dikunci dan tertutup untuk dilakukan revisi. Sehingga dengan begitu masih bisa dilakukan revisi.

Selain masalah anggaran yang diduga 'siluman' itu, rapat kerja kemarin juga kembali menyoal ngadatnya pencairan dana hibah. Ironisnya, saat dewan mempersoalkan hibah, eksekutif berencana memasang tambahan kesejahteraan PNS. Tak tanggung-tanggung tambahan kesejahteraan bagi PNS nyaris setengah triliun yaitu Rp 408 miliar. Dengan rencana penambahan ini berarti akan terjadi lonjakan cuku besar dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 311 miliar.

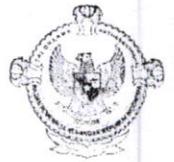
Tak ayal hal itu membuar gerah anggota dewan. "Tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2015 mencapai Rp 311 miliar, kemudian pada tahun 2016 dirancang Rp 408 miliar, itu dibagi-bagi oleh pegawai. Sedangkan hibah untuk masyarakat justru tidak bisa dicairkan," kata Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria.

Sesuai ketentuan adanya penambahan kesejahteraan untuk pegawai harus

melalui pembahasan dengan dewan, akan tetapi selama ini hal itu tidak dilakukan. Raker akhirnya dihentikan oleh Sunarta, dan meminta eksekutif memberikan penjelasan secara tertulis.

Menanggapi masalah ngadatnya hibah itu, Pj Bupati Badung Yudha Saka menegaskan, dana hibah tahun 2015 tidak bisa cair. "Sekali lagi, ini bukan masalah berani atau tidak berani. Semuanya harus sesuai dengan aturan yaitu Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah," jelas birokrat asal Buleleng, itu.

Walau demikian, pihaknya menyatakan dana hibah baru akan dicairkan pada tahun 2016. Bahkan tak bisa secara cuma-cuma seperti yang sudah-sudah, mengingat bantuan dana hibah akan diberikan dalam bentuk kegiatan. Pihaknya berjanji akan mengalihkan proposal dana hibah yang difasilitasi dewan masuk dalam APBD desa (APB-Des). Selain APBDes, proposal juga akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan fisik satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Sebenarnya ini masalah nasional, tidak hanya di Bali. Seluruh Indonesia juga sudah seperti ini," imbuhnya. **as**



Inspektorat Diperintah Usut Penyewaan Ruko Pemkab

Inspektorat juga diminta menelusuri kerugian daerah dari pengelolaan ruko itu.

NEGARA, NusaBali

Inspektorat diperintahkan mengusut dugaan ruko Pemkab Jembrana di dekat Terminal Manuver Pelabuhan Gilimanuk yang diduga disewakan oknum kelurahan. Selain menelusuri kebenaran informasi itu, Inspektorat juga diperintah melacak kerugian daerah yang timbul dari pengelolaan ruko yang diserahkan ke Kelurahan Gilimanuk itu.

Sekcab Jembrana, I Gede Gunadnya mengaku baru mengetahui informasi penyewaan ruko di dekat Terminal Manuver Pelabuhan Gilimanuk itu. Gunadnya mengaku dapat informasi dari Asisten I Setda Jembrana, I Made Sudiada yang kebetulan mengikuti rapat kerja bersama DPRD Jembrana mengenai

kerusakan sendiran Pura Segara Gilimanuk, Senin (19/10).

"Kami perintahkan Inspektorat segera turun. Apakah informasi ini benar atau tidak," terang Gunadnya, Selasa (20/10).

Selain mencari kebenaran informasi penyalahgunaan ruko, Inspektorat juga diminta menelusuri kerugian daerah dari pengelolaan ruko itu. Sebab ada dugaan pungutan yang disebutkan diserahkan ke Kelurahan Gilimanuk. Perlu dicek muara pungutan tersebut berlabuh.

"Apakah memang masuk ke kas daerah atau menguap dimana. Kita akan minta keterangan dari Lurah," imbuhnya.

Sebelumnya, Lurah Gilimanuk I Gede Ngurah Widiada membantah dugaan penyewaan ruko yang mengarah pungutan liar tersebut. Ia mengaku hanya mewarisi



• DOKNUSABALI
Gede Gunadnya

apa yang sudah dijalankan, dan tidak tahu pasti tentang pungutan Rp 150.000 per bulan bagi penyewa ruko. Ia membenarkan jika dari 30 unit ruko, 7 unit ditempati penduduk pendatang (duktang) yang pekerjaannya sebagai pedagang.

Sebaliknya, penyewa ruko mengungkap hanya ada 6 ruko yang masih kosong. Penghuni ruko tak hanya dari pedagang, tapi juga ada buruh hingga cewek kafe di seputaran Gilimanuk. Mereka mengaku menyeter dana Rp 150 ribu per bulan yang dipungut oknum kelurahan. Jika tak punya uang, bisa dibayar Rp 5.000 per hari.

Ruko ini dibangun di era kepemimpinan Bupati Jembrana I Gede Winasa pada tahun 2000. Selanjutnya, ruko ini diserahkan ke Kelurahan Gilimanuk untuk pengelolaannya. **od**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 7



Kasus Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada Dua Terdakwa Dituntut Hukuman Ringan

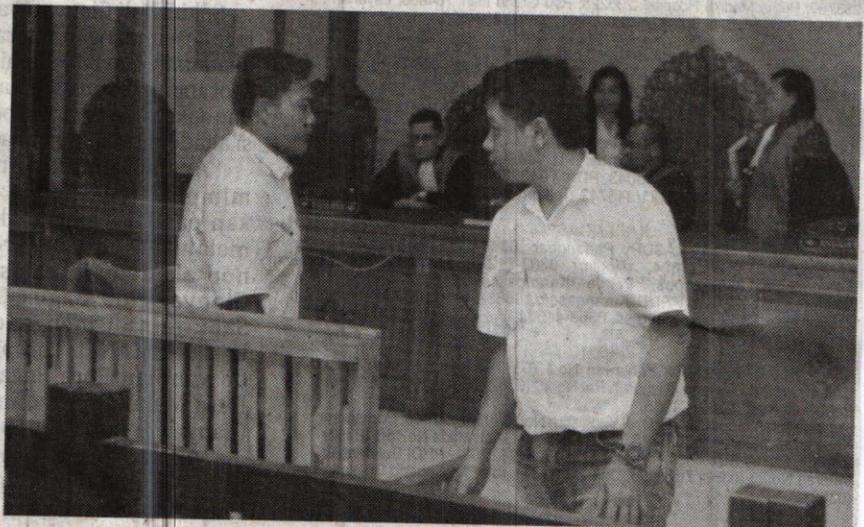
DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pavingisasi Jalan Gajah Mada, Denpasar, yaitu Alit Widhiadnyana AS (Direktur PT Alit Wirajaya) dan Ngurah Kosala Cakrawerthi (Direktur CV Unika Design) dituntut 1,5 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (20/10).

Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agus Suraharta dkk di hadapan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili dinyatakan jika kedua terdakwa bersalah sesuai pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, yaitu kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Serta hal meringankan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, JPU membacakan tuntutan untuk keduanya. "Menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan ditambah denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara," ujar JPU dalamuntutannya.

Majelis hakim akan melanjutkan sidang pada pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan). "Sidang kita tunda satu minggu untuk pledoi," pungkas Peten Sili. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari



• NUSABALI/HENDRA

DUA terdakwa kasus dugaan korupsi pavingisasi Jalan Gajah Mada, Denpasar, yaitu Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerthi usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (20/10).

penetapan Jalan Gajah Mada, Denpasar sebagai kawasan heritage.

Selanjutnya dilakukan pedestrian Jalan Gajah Mada dengan anggaran 3,1 miliar. Setelah dilakukan tender, didapat pemenang PT Alit Wirajaya dengan penawaran Rp 2,5 miliar. Selain menetapkan pemenang tender PT Alit Wirajaya yang dipimpin Alit Widhiadnyana, juga ditetapkan konsultan pengawas CV Unika Desain yang dipimpin terdakwa Ngurah Kosala Cakrawerti dengan nilai kontrak Rp 49,9 juta. Penyelewengan mulai terjadi saat proyek dilaksanakan.

Pasalnya, dalam pelaksanaan proyek

tidak sesuai dengan perencanaan atau DED (Detail Engenering Design). Di antaranya dengan adanya perubahan volume karena tidak dipasangnya paving di atas jembatan Jalan Gajah Mada. Atas pekerjaannya ini PT Alit Wirajaya menerima pembayaran hingga Rp 2,2 miliar lebih. Namun dari hasil audit BPKP Wilayah Bali ditemukan realisasi anggaran negara Rp 2, 2 miliar sementara nilai fisik yang diterima hanya Rp 2 miliar lebih. Sehingga ada kerugian negara Rp 210.541.795. rez

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 5



Pelindo Bangun Dermaga Tanpa Izin

Meski proyek itu milik Badan Usaha Milik Negara yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat, kegiatan itu harus mengikuti aturan yang ada di kabupaten.



• NUSABALI/SUDIERTA

LOKASI proyek pembangunan dermaga curah cair di Celukan Bawang yang didatangi Satpol PP Buleleng kemarin.

SINGARAJA, NusaBali

PT Pelabuhan Indonesia III, Celukan Bawang tengah membangun sebuah dermaga baru di kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Dermaga itu nantinya diperuntukkan sebagai dermaga curah cair yang posisinya tidak jauh dari dermaga dari sebuah perusahaan semen.

Namun, belakangan diketahui pembangunan itu disinyalir belum kantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lainnya dari Pemkab Buleleng. Satpol PP Pemkab Buleleng yang kembali turun untuk ketiga kali ke lokasi, Selasa (20/10) siang, mengancam

menutup paksa pembangunan tersebut.

Data di lokasi menyebut, dermaga curah cair itu dibangun dengan panjang 300 meter ke tengah laut, dan lebar 2 meter. Dalam papan proyek, tidak disebutkan nilai proyek. Namun proyek itu dikerjakan oleh PT Adhi Karya bertanggal kontrak 10 Februari 2015.

Rombongan Satpol PP yang dipimpin langsung Kepala Badan Satpol PP, I Made Budi Astawa, tidak menemukan pejabat yang bisa memberikan keterangan terkait proyek tersebut. Rombongan hanya diterima seorang

pekerja yang tidak mengetahui apapun. Karena tidak menemukan siapapun, rombongan Pol PP lantas menuju kantor Pelindo III Celukan Bawang.

Di situ, rombongan Pol PP hanya ditemui oleh seorang staf umum Pelabuhan Celukan Bawang Antok Dewanto. "Kami sudah tiga kali kesini, pertama kami tidak temukan siapapun di lokasi, kedua kami kesini sudah minta agar pihak Pelindo III datang ke kantor untuk menjelaskan perizinan, tapi juga tidak ada respon, sekarang kami kesini lagi juga belum mendapat penjelasan apapun, tapi kami tetap minta

Edisi : Revisi, 21 Oktober 2015

Hal : 4



Sambungan - - -

agar pihak Pelindo tetap datang ke kantor," kata Kepala Badan Satpol PP Budi Astawa.

Menurut Budi Astawa, sekalipun proyek itu milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat, kegiatan itu harus mengikuti aturan yang ada di kabupaten. Masalahnya kabupaten selain memiliki Peraturan Daerah (Perda), juga sebagai tuan rumah dari kegiatan tersebut.

"Kami memiliki aturan juga, ya mesti disampaikan juga ke kami. Sehingga Pemkab Buleleng juga mengetahui pembangunan itu. Ini (Pelabuhan Celukan Bawang, red) kan ada di daerah Buleleng," ujarnya.

Budi Astawa juga meminta agar, aktivitas di proyek tersebut dihentikan sementara, sebelum ada kejelasan dari pemilik proyek menjelaskan perizinan yang sudah dikantongi. Budi Astawa juga meminta agar pihak Pelindo III, bisa memberikan klarifikasinya dengan datang ke Kantor Badan Satpol PP. "Nanti kita lihat perkembangannya, kami masih memberikan waktu, kalau memang tidak ada penjelasan, kami terpaksa segel kegiatan itu," tandasnya.

Sementara, staf umum Pelabuhan Celukan Bawang Antok De-

wanto menyebut, dari dokumen yang ada, pembangunan dermaga curah cair itu telah kantongi UKL/UPL dari Pemprov Bali. Namun, ia sendiri kurang mengerti secara detail tentang proyek tersebut. "Secara tata krama semua kegiatan dalam pelabuhan menjadi kewenangan kesyahbandaran otoritas pelabuhan, silakan dikonfirmasi ke sana," ujarnya singkat.

Di tempat yang sama Perbekel Desa Celukan Bawang M Azhari yang mendampingi rombongan Satpol PP menyebut, pembangunan dermaga curah cair itu sudah disosialisasikan pihak Pelindo kepada masyarakat. Bahkan seingatnya, dalam sosialisasi itu dihadiri sejumlah pejabat dari Dinas Perhubungan dan pejabat lainnya.

"Waktu sosialisasi itu sudah disebutkan kajian UKL/UPL, karena sudah ada seperti itu, saya kira perizinannya sudah lengkap, Apalagi ada pejabat instansi terkait juga hadir," terangnya.

Menurut Perbekel M Azhari, terkait dengan pembangunan itu, pihaknya sudah pindahkan kurang lebih 20 nelayan yang sebelumnya tempati lokasi proyek sebagai tempat tambatkan perahu mereka. Para nelayan itu kini dipindah ke tempat lain yang sudah disetujui nelayan. **k19**



Perusda Bali Bersiap Modali Jalan Tol

Perusda Bali harus menyiapkan modal awal Rp 1,25 miliar dari anggaran sebesar Rp 25 triliun, untuk pembangunan empat ruas jalan tol.

DENPASAR, NusaBali

Jajaran Perusahaan Daerah (Perusda) Bali mengklaim akan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan

modal awal pembangunan empat ruas jalan tol, bekerja sama dengan salah satu anak perusahaan PT Waskita Karya.

"Kami harus menyiapkan modal awal sekitar Rp 1,25 miliar. Kami harus punya modal untuk itu," kata Direktur Utama Perusda Bali I Nyoman Baskara, di Denpasar, Selasa (20/10).

Untuk pemenuhan modal awal itu, pihaknya akan mempercepat penyelesaian Taman Tohpati, Denpasar, serta mengoptimalkan aset lainnya di kawasan Kreneng, Denpasar yang diberikan hak sewa menjadi Mandara Graha.

"Memang untuk keseluruhan biaya yang diperlukan sekitar Rp 25 triliun, itu sudah termasuk untuk pembebasan lahan.

Tetapi untuk modal awal itu sekitar Rp 20 miliar, dan Perusda Bali perlu menyiapkan Rp 1,25 miliar," ucapnya.

Waskita Toll Road (WTR) sebagai salah satu anak perusahaan PT Waskita Karya sebelumnya menyatakan akan menggandeng Perusahaan Daerah Bali untuk merealisasikan rencana pembangunan empat ruas tol sepanjang 125 kilometer.

"Kami ingin mengawal dalam artian sejak proses perencanaan dan sosialisasi dari ide besar ini. Tol merupakan infrastruktur strategis yang harus kami kawal dan peran Perusda juga fasilitator kepada masyarakat di daerah-daerah yang akan dilalui, termasuk proses

perizinannya," kata Baskara.

Selain itu, Perusda Bali juga akan meng-update atau memuktakhirkan studi kelayakan (FS) terkait pembangunan empat ruas tol tersebut yang akan dimulai pada 2016.

Beberapa waktu sebelumnya, Direktur Keuangan Waskita Toll Road Feri Purwadi saat menemui Gubernur Bali mengatakan pihaknya dengan menggandeng Perusda Bali akan membentuk Waskita Bali Mandara.

Feri mengemukakan bahwa WTR merupakan anak perusahaan Waskita Karya yang fokus melakukan investasi dalam pembangunan tol di seluruh Indonesia. Saat ini, delapan badan usaha jalan tol telah diakuisisi

oleh WTR.

"Langkah ini merupakan salah satu prasyarat bagi Waskita sebagai pemrakarsa pembangunan jalan tol di Bali. Terbentuknya Waskita Bali Mandara merupakan perkembangan positif dalam rencana pembangunan jalan tol di Bali," ujarnya.

Empat ruas jalan tol yang rencananya dibangun antara lain ruas Kuta-Canggu-Tanah Lot-Soka sepanjang 28 kilometer, Soka-Pekutatan 25,1 kilometer, Pekutatan-Gilimanuk 54,4 kilometer dan Pekutatan-Lovina sepanjang 46,7 kilometer. Untuk tahap awal, pihak Waskita rencananya akan menggarap ruas Kuta-Canggu-Tanah Lot-Soka. **ant**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 3